

Serapan Rendah, Sekda Banjarmasin Ancam Nonjobkan Pejabat



Sekda Kota Banjarmasin, Hamli Kursani

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin, Hamli Kursani, gerah akibat ulah 16 SKPD. Diketahui mayoritas serapan anggaran rendah pada 2019. Bahkan, mereka dimasukkan dalam zona merah dan kuning.

Hamli merasa heran mengapa hal ini bisa terjadi. Padahal, menurut dia, para SKPD selalu diberi arahan untuk bekerja secara optimal dengan evaluasi setiap triwulan. Apalagi, Pemkot Banjarmasin sudah menerapkan tunjangan kinerja (tukin), dengan harapan bisa mendongkrak semangat para pegawainya dalam bekerja. Namun nyatanya pemberian ini tak sesuai harapan. "Sebetulnya satu semester itu serapan masih rendah sudah masuk lampu merah. Saya heran padahal sudah sering dibilangin," ucap Hamli Kursani kepada wartawan banjarhits.id, Kamis (19/12/2019).

Keenam belas SKPD ini yakni, Dinas Kesehatan, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan

Perikanan, Bagian Humas dan Protokol, Dinas Pendidikan, Bagian Pemerintah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Bagian Hukum.

Hamli mewanti-wanti agar hal ini tak terulang lagi pada 2020. Jika terulang, Hamli tak segan memberi sanksi ekstrem, berupa pembebas tugas alias dinonjobkan. "Bukan hanya dalam bentuk potongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Bukan juga digeser jabatan. Tapi nonjob. Maunya saya begitu," katanya.

Menurut Hamli, Pemkot sudah terlalu banyak memberi toleransi perihal rendahnya serapan anggaran. Setiap evaluasi, ada yang realisasi anggarannya masih rendah selalu diberi diberikan kesempatan untuk memperbaiki. "2020 tak ada lagi masa belajar. Kasian masyarakat. Duit ada, tapi kegiatan tidak dilaksanakan," ketusnya.

Sumber Berita :

1. <https://kumparan.com>, *Serapan Rendah, Sekda Banjarmasin Ancam Nonjobkan Pejabat*, Kamis, 19 Desember 2019
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Serapan Rendah, Tunjangan 16 Kepala SKPD Dipotong pada 15 Desember 2019 ini*, Jumat, 13 Desember 2019

Catatan Berita :

Silpa dalam struktur pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah salah satu komponen dari sumber penerimaan pembiayaan. Silpa baru dapat ditetapkan besarnya setelah proses audit yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan biasanya maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, misalnya, silpa tahun anggaran 2018 baru akan diketahui secara riil atau definitif paling cepat pada April 2019, demikian selanjutnya.

Ditinjau dari sumbernya, silpa dapat diakumulasi dari tiga komponen utama. Pertama, dari adanya efisiensi belanja kegiatan pembangunan baik belanja langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan oleh SKPD. Kedua, dari adanya sejumlah kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau terlaksana, namun tidak mencapai target fisik yang direncanakan. Ketiga, dari adanya realisasi pendapatan daerah yang melampaui target yang ditetapkan.

Efisiensi belanja dari pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat terjadi, karena adanya upaya penghematan belanja dalam proses pelaksanaan kegiatan baik yang dilaksanakan secara

swakelola maupun melalui proses-proses pengadaan barang dan jasa, baik melalui penunjukan langsung maupun pelelangan, sebagaimana diatur oleh Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.